

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Mahrus. 2021. *Viktimologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djafar, Wahyudi., Eddyono, S.W., Napitupulu, Erasmus A. T., Sriyana., Sufriyadi. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Napitupulu, Erasmus. 2014. *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West.
- Gaussyah, M., Syarif, Laode M., Qisai, Achmad., Tanjung, Ali Akbar., Trisasongko, Dadang., Yonesta, Feby. 2012. *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan, Laporan Studi GAP Analysis antara UNCAT (United Nation Convention Against Torture) dan sistem hukum, perundang-undangan serta kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hardjo, Philipus.M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hidayat, Nurkholis dan Hutabarat, Restaria F. 2012. *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform.
- HS, Salim. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuffal, H.M.A. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Loqman, Loebby. 1990. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elsatri. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum Cer.I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni.
- Nasution, Adnan Buyung. 2008. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Pandu, Yudha. 2004. *Klien & Advokat Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Abadi.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan
- Prist, Darwan. 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik, cet. 1*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Simbolon, Antonius Benari. 2020. *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Simorangkir, J.C.T. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarif, Laode M. dan Trisasongko, Dadang. 2012. *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks Persepsi Penyiksaan*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform.
- Tanuredja, Tukiran, and Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim PERADI untuk RUU KUHAP. 2010. *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. "Hakim Komisaris: Solusi Kearah Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 32, Nomor 3.
- Barhamudin dan Bustomi, Abuyazid. 2022. "Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP." *Solusi* Volume 20, Nomor 2.
- Fitriyadi, Ahmad Adi dan Latukau, Fikry. 2020. "Pentingnya Implementing Legislation Konvensi Anti Penyiksaan 1984 (Convention Against Torture) Kedalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Belo* Volume V, Nomor 2.
- Hikmawati, Puteri. 2013. "Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)." *Kajian* Volume 18 Nomor 1.
- Jayawisasta, Komang Panji dan Sugama, I Dewa Gede Dana. 2020. "Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Wicara* Volume 9, Nomor 9

- Maringka, Rifaldi Jesaya. 2017. "Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981." *Jurnal Hukum Unsrat* Volume 23, Nomor 10.
- Pangaribuan, Luhut. M. P. 2014. "Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Teropong MaPPI FHUI* Volume 1.
- Patra, Rommy. 2018. "Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Volume 15, Nomor 3.
- Purwanto, Heri. 2016. "Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015." *Jurnal Media Hukum* Volume 23, Nomor 1.
- Separovic, Zvonimir Paul. 1985. "Victimology: Studies of Victims."
- Soplintila, Shynta, 2017. "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015." *Lex Crimen* Volume 1, Nomor 10.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Astrid Herera Nurchikmah, 2018, "*Prospek Ratifikasi Optional Protocol of Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Tahun 2002 Terhadap Tahanan di Indonesia*", Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pembaharuan Hukum Nasional, 2011, "*Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*", BPHN, Jakarta.
- Dicky Sheri Aditya, 2014, "*Praperadilan Sebagai Fungsi Pengawasan Horizontal dalam Penyelesaian Perkara Pidana*", Naskah Publikasi Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Marietza Aditya Yuristia, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Cyberbullying dalam Perspektif Viktimologi*", Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Makalah

- Mudzakkir, "*Pembatasan dan Perluasan Hakikat Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana: Telaah Putusan Praperadilan Komjen Pol BG.*" Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta, Jakarta, 1 April 2015.

E. Internet

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, "*Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2020 – Mei 2021*", <https://kontras.org/2021/06/25/laporan-situasi-praktik-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia-di-indonesia-periode-juni-2020-mei-2021/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Korban*", <https://kbbi.web.id/korban>.

Kamus Hukum, "*Error In Persona*", <https://kamushukum.web.id/arti-kata/error-in-persona/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Perlindungan*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Hukum*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>, diakses pada 25 Juli 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Penyidikan*", <https://kbbi.web.id/sidik>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Penyiksaan*", <https://kbbi.web.id/siksa>, diakses pada 30 Juli 2022

Institute Criminal Justice Reform, "*Konvensi Anti Penyiksaan*", <https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>.

Haris Azhar, "*Siaran Pers: Peradilan Sesat untuk Luthfi*", <https://lokataru.id/siaran-pers-peradilan-sesat-untuk-luthfi/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*Praperadilan, Tinjauan Juridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10852>.

F. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.

Resolusi PBB Nomor 40/34 Tahun 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.